

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmadi, Abu. 2005, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Angkasa, Nitaria. 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Laduny, Lampung.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika.
- _____. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Erwinsyahbana, Tengku. 2015, *Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Berastagi: Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
- Ibung, Dian. 2013, *Mengembangkan nilai moral pada anak*, Elex Media Komputindo.
- Jesus Orozco-Henriquez, Et. Al., 2010, *Keadilan Pemilu (Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook)*, diterjemahkan oleh Dua Bahasa, International IDEA, Swedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana pranda media group, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Muhammad, dan Teguh Prasetyo. 2018, *Eksistensi DKPP RI dalam mengawal demokrasi dan pemilu bermartabat*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Prasetyo, Teguh. 2018, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, PT. Raja Grafindo, Depok.
- _____. 2018, *Filsafat Pemilu*, Nusa Media, Bandung.
- Saldi Isra, Khairul Fahmi. 2019, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip dalam konstitusi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok,
- Sholahuddin, Abdul Hakam. 2023, *Hukum Pemilu di Indonesia*, PT Sada Kurnia Pustaka, Kab Serang, Banten.
- Sugiyono, 2006, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang. 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
- Peraturan DKPP RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
- Peraturan DKPP RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Putusan DKPP Nomor 35-39-PKE-DKPP/II/2023
- Putusan DKPP Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024

C. Jurnal dan Skripsi

- Akhyaroni Fu'adah, Implikasi Etika Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Penegakan Demokrasi di Indonesia, Prosiding Seminar Hukum Aktual, 2024.
- Emy Hajar Abra, Problematika Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum 2024 di Indonesia, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Imron Rosadi, Adhitya Widya Kartika, Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Journal Presumption of law, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Vol 6 No.2, 2024.
- Ipel Gunadi, Skripsi: Konsep etika menurut Franz Magnis Suseno, (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Khairul Fahmi, 2016, Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.2, 2016.
- Khoirul Anam, 2024, Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh DKPP: Analisis Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Journal of Contemporary Law Studies Vol 2 No 1, 2024.
- Maharani Nurdin, 2019, Eksistensi DKPP dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu, Jurnal VERITAS Universitas Islam As-Syafi'iyah Vol.5 No.2, 2019.
- Miswardi,dkk. Etika, Moralitas, dan Penegak Hukum, Jurnal Menara Ilmu, Fakultas Ekonomi IAIN Bukittinggi, Vol XV No.2, 2021.
- M.Bintang Alfarras, 2023, Kedudukan Etika, Moral, Dan Hukum, Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Vol 1 No.2, 2023.
- Utang Rosidin, Penguatan DKPP Dalam Penegakan Hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Jurnal Litigasi, Vol 25 No.2, 2024.
- Wilhelmina R. Tehubijiluw, Etika dan Kekuasaan: Tinjauan UU TPKS terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Kuasa, Jurnal Hukum dan Gender, Vol.5 No.2, 2023.
- Zulkarnain, M., Ningsih, N.P, 2024, Peran DKPP dalam Penyelesaian Pelanggaran Etik Penyelenggaraan Pemilu, Justisi 9 (3), 2024.

D. Website

- Andry Novelino, "*Jejak Ketua KPU yang dipecat DKPP: Arief Budiman dan Hasyim Asy'ari*", CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240704085706-20-1117400/jejak-ketua-kpu-yang-dipecat-dkpp-arief-budiman-dan-hasyim-asyari> dikunjungi pada tanggal 26 November 2024, jam 23.00.
- ARUNIKA SIGANIS, "*Implementasi kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam meretas disparitas*", <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/implementasi-kode-etik-dan-pedoman-perilaku-hakim-dalam-meretas-disparitas/a-95arnZoJ1Z> dikunjungi pada tanggal 8 Mei 2025 jam 20.50
- Awasi pemilu, "*4 jenis pelanggaran pemilu dan sanksinya*" <https://www.awasipemilu.com/2022/12/4-jenis-pelanggaran-pemilu-dan-sanksinya> dikunjungi pada tanggal 6 Maret 2025 jam 22.00.
- Badan Kepegawaian Negara, "*Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*", <https://www.bkn.go.id/unggah/2022/10/Memahami-Peraturan-Disiplin-PNS-2022-FINAL-29.10.22.pdf> dikunjungi pada tanggal 9 Mei 2025 jam 17.40.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), "*Putusan DKPP terhadap Hasyim Asy'ari*", <https://dkpp.go.id/putusan/> dikunjungi pada tanggal 6 Maret 2025 jam 22.50.

- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), *“Putusan DKPP harus dipahami sebagai keputusan lembaga etik, bukan hukum positif”* <https://dkpp.go.id/putusan-dkpp-harus-dipahami-sebagai-keputusan-lembaga-etik-bukan-hukum-positif/> dikunjungi pada tanggal 8 Mei 2025 jam 21.00.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), *“Laporan Kinerja DKPP RI Tahun 2023”*, <https://dkpp.go.id/publikasi/buku-laporan-kinerja-dkpp-tahun-2023/> dikunjungi pada tanggal 10 April 2025 jam 23.15.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), *“Penetapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu”*, <https://dkpp.go.id/journal/> dikunjungi pada tanggal 21 april 2025 jam 20.40.
- Hukum Online, *“Wajib dibaca! 6 tips dasar penelitian hukum”*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/> dikunjungi pada tanggal 17 Maret 2025 jam 15.30
- Hukum Online, *“Beda Delik Aduan dengan Delik Biasa dan Contohnya”*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/> dikunjungi pada tanggal 2 Juni 2025 jam 01.25.
- Komnas Perempuan, 2024, *“Pernyataan sikap Komnas Perempuan atas putusan DKPP RI tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari”* <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataaan-sikap-komnas-perempuan-atas-putusan-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu-ri-tentang-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu-terhadap-ketua-kpu-hasyim-asyari> dikunjungi pada tanggal 8 Mei 2025 jam 00.10.
- Kompas.com, 2023, *“Ketua DKPP tak ragu jatuhkan sanksi tegas atas pelanggaran etik penyelenggara pemilu”* <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/01/18125081/ketua-dkpp-tak-ragu-jatuhkan-sanksi-tegas-atas-pelanggaran-etik> dikunjungi pada tanggal 24 April 2025 jam 16.30.
- Kompas.com, 2023, *“Ketua KPU Terbukti Langgar Etik, Sanksi DKPP dinilai kurang tegas”* <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/06/23042351/ketua-kpu-terbukti-langgar-etik-sanksi-dkpp-dinilai-kurang-tegas> dikunjungi pada tanggal 7 Mei 2025 jam 22.50.
- Nicholas Ryan Aditya, 2024, *“Jejak kasus pelanggaran Hasyim Asy'ari: nyaris setiap bulan diperingatkan DKPP”*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/03/09361921/jejak-kasus-pelanggaran-hasyim-asyari-nyaris-setiap-bulan-diperingatkan-dkpp?page=all&utm> dikunjungi pada tanggal 6 Maret 2025 jam 23.05.
- Perludem, *“DKPP Berhentikan Hasyim Asy'ari: KPU Harus Serius Berbenah untuk Hadirkan Pemilu yang Inklusif, Aman, dan Bebas dari Kekerasan Terhadap Perempuan”*, <https://perludem.org/2024/07/05/dkpp-berhentikan-hasyim-asyari-kpu-harus-serius-berbenah-untuk-hadirkan-pemilu-yang-inklusif-aman-dan-bebas-dari-kekerasan-terhadap-perempuan/> dikunjungi pada tanggal 27 November 2024 jam 01.00.
- Rais Agil Bahtiar, *“Konsekuensi Pemberhentian Ketua KPU RI”*, Isu Sepekan Bidang Polhukam Komisi II, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Juli-2024-1982.pdf, dikunjungi pada tanggal 27 November 2024 jam 00.25.
- Widhia Arum, 2023, *“Pelanggaran pemilu: jenis-jenis, pencegahan, dan penanganannya”*, <https://news.detik.com/pemilu/6549735/pelanggaran-pemilu-jenis-jenis-pencegahan-dan-penanganannya?> dikunjungi pada tanggal 6 Maret 2025 jam 22.35.